

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. (2016). Studi Penentuan Prioritas Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Kabupaten Sintang. *Teknik Sipil*, 16(1), 1–15.
- Bupati Malang, (2009). Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/146/KEP/421.013/2009 Tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan jalan Kota Kecamatan di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang.
- Brahmantoro, W., Hidayat, S., & Sebayang, N. (2019). Roads widening selection in Tulungagung: Application of AHP. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 1517–1522.
- Budiwan, A., & Permata, R. (2017). Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jembatan di Dinas Pupr Prov . Sumbar Ruas Singkarak - Arian - Tanjung Balit - Padang Ganting.
- Dana, D. (2018). Analisis Daya Dukung dan Penurunan (Settlement) Pondasi Bored Pile Jembatan Kali Rambut dengan Menggunakan Software Allpile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi 3-4. Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, (2019). Tentang Rencana Strategis (Renstra). Malang, (2019). Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, (1993). Panduan Pemeriksaan Jembatan. Jakarta, (1993). Indonesia.
- Girsang, L. E. P. (2018). Kajian Kriteria Penentuan Skala Prioritas Pada Proyek Penanganan Jalan Nasional (Studi Kasus Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Poli-Teknologi*, 17(1). <https://doi.org/10.32722/pt.v17i1.1100>
- Haslinda, Said, L. B., & Syafei, I. (2021). Prioritas Penanganan Ruas Jalan Nasional di Pulau Sumba dengan Metode Analytical Hierarchy Proses ( AHP ). *Jurnal Flyover (JFO)*, 1(2), 17–27.
- Kholilah, K. (2017). Penentuan Skala Prioritas Lokasi Jembatan yang Perlu Pelebaran Sebagai Upaya Mengurai Kemacetan Pada Ruas Jalan Lawang-Malang Dengan Analytical Hierarchy Process (Ahp). Tesis ITN Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun (2010) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Malang, (2010). Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun (2017) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jakarta, (2017). Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun (2018) tentang Standar Pelayanan Minimum. Jakarta, (2018). Indonesia

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020. (2020). Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan JABODETABEKPUNJUR. Pemerintah Indonesia (Issue 1). Pemerintah Indonesia.
- Prasetyo, E. D. W., Handajani, M., & Ismiyati. (2019). Criteria Analysis, weight and Priority for Handling Bridges in Kudus District using AHP and Promethee II methods. *Journal of Physics: Conference Series*, 1167(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1167/1/012009>
- Rahma, A. A., dan Dana, D. (2016). Perhitungan Balok PCI-Girder Prestressed di PWB 234-235 Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (BeCaKaYu). Tugas Akhir tidak diterbitkan. Jakarta: TS Politeknik Negeri Jakarta.
- Rakhmatika, R., Setiadji, B. H., & Riyanto, B. (2017). Penentuan Urutan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 23(1), 38. <https://doi.org/10.14710/mkts.v23i1.12870>
- Ritonga, E. D. E. (2011). Kajian Kriteria Penanganan Jalan Nasional Lintas Timur Provinsi Sumatera Utara. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Saputra, E., Anggraini, R., & Muttaqin, M. (2021). Prioritas Pembangunan Jembatan di Kabupaten Aceh Besar. *Teras Jurnal*, 11(1), 181. <https://doi.org/10.29103/tj.v11i1.424>
- Siswanto, A., Hidayah, E., & Hasanuddin, A. (n.d.). Analysis on the Implementation of Analytic Hierarchy Process and Decision Tree C4 . 5 to Support Priority Determination in the Maintenance of Bridge in Lumajang. 84–96.
- Saaty, T.L. (1993) : Pengambilan Keputusan (Cetakan Ke II), PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Sudradjat, H., Djakfar, L., & Zaika, Y. (2015). Penentuan Prioritas Penanganan Jembatan Pada Jaringan Jalan Provinsi Jawa Timur ( Wilayah UPT Surabaya : Kota Surabaya , Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik ). *Rekayasa Sipil*, 9(3), 219–228.
- Syuryadi, P. A. (2017). Pengembangan model rating kondisi jembatan berbasis analytical network process dalam sistem manajemen jembatan. [repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2686](https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2686)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun (2022) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jakarta, (2022). Indonesia.
- Shintike, Y. L., Pah, J. J. S., dan Bunganaen, W. (2015). Analisa Nilai Sisa Kapasitas Bangunan Atas Jembatan Bahanapu Dengan Menggunakan Metode Rating Factor. *Jurnal Teknik Sipil*, Iv(1), 79–90.